

Pembangunan Ekonomi untuk Semua

FAJAR KURNIANTO

“Tujuan mendasar pembangunan ekonomi bukanlah pertumbuhan semata, tetapi peningkatan kesejahteraan manusia” — Nancy Birdsall, Presiden Center for Global Development (CGD)

Pembangunan ekonomi menjadi jargon hampir semua rezim di Indonesia. Yang paling fenomenal tentu saja jargon “pembangunan” rezim Orde Baru (Orba) di bawah Presiden Soeharto. Atas nama pembangunan, rezim ini bahkan tidak segan-segan menyingkirkan segala macam penghambat dengan jalan kekerasan, perampasan, teror dan sejenisnya.

Hasilnya, secara fisik memang terlihat maju, terutama di Jawa, dan lebih-lebih di Jakarta. Di luar Jawa, apalagi di daerah Indonesia Timur, hanya bisa gigit jari: kekayaan alam dikeruk untuk membangun Jawa, mirip Kolonial Belanda yang mengeruk kekayaan Hindia Belanda untuk membangun negeri Belanda.

Sentralisasi pembangunan yang terpusat di Jawa, dan terutama di Jakarta, membuat daerah-daerah di luar Jawa, terutama di kawasan Indonesia Timur, jauh dari sejahtera. Pertumbuhan ekonomi selama rezim Orba memang melejit, membuat Indonesia diprediksi menjadi macan Asia. Apalagi ketika Indonesia berhasil menjadi negara berswasembada beras tahun 1984.

Tetapi, rupanya pertumbuhan ekonomi tidak selaras dengan kondisi riil masyarakat. Angka kemiskinan begitu tinggi, karena selain pertumbuhan itu tidak berefek nyata terhadap semua kalangan masyarakat, korupsi secara perlahan-lahan menggerogoti di instansi-instansi pemerintahan.

Penikmat pertumbuhan ekonomi ternyata hanya sebagian kalangan kecil. Ini terutama mereka yang punya akses ekonomi yang lebih baik dan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Sementara masyarakat kecil yang tidak punya akses tetaplah menjadi objek penderita, karena akses-akses itu tertutup dan dimonopoli sebagian kecil orang. Tidak adanya akses memang menjadi masalah utama.

Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi tahun 1998, mengatakan bahwa penyebab langgengnya kemiskinan, ketidakberdayaan, dan keterbelakangan adalah karena ketiadaan akses.

Akibat keterbatasan akses, pilihan manusia menjadi terbatas—bahkan tidak ada—untuk mengembangkan kehidupannya.

Selain itu, dampak buruk lainnya akibat model pembangunan Orba adalah terjadi banyak kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, selain perbedaan atau kesenjangan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat yang terasa semakin tajam, juga penumpukan utang luar negeri. Pembangunan ekonomi juga menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini terutama dilakukan oleh kroni-kroni Soeharto, baik itu dari kalangan keluarga, sahabat, maupun orang-orang dekatnya.

Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

Di balik pertumbuhan ekonomi yang tampak tinggi rupanya ada persoalan serius yang gagal diselesaikan pemerintah ketika itu, yakni pembangunan ekonomi riil manusia di Indonesia secara merata dan adil. Padahal, seperti dikatakan juga oleh Nanci Birdsall secara tegas dalam salah satu tulisannya bertajuk *Social Development is Economic Development*, “social development is good economics”.

Pertumbuhan ekonomi memang diperlukan, namun tidak cukup karena pada akhirnya sumber daya manusia unggul dan produktif adalah kunci kemajuan serta keberlanjutan pembangunan. Karena itu, apa yang disebut dengan pembangunan inklusif atau pembangunan untuk semua, tanpa diskriminasi menjadi hal yang sangat mendesak.

Tergantung Birokrat

Pembangunan inklusif, seperti disebutkan dalam buku *Pembangunan Inklusif, Prospek dan Tantangan Indonesia* (LP3ES, 2012), oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme/UNDP) didefinisikan sebagai pembangunan ekonomi yang melibatkan dan mengikutsertakan semua warga negara.

Bukan hanya mereka yang berbakat, kaya, cerdas, sehat, berkemampuan lebih baik atau berkedudukan tinggi saja, tetapi mereka yang kurang beruntung juga berhak menikmati manfaat pembangunan. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi jangan sampai mengabaikan kemiskinan dan menafikan ketimpangan yang justru akan melahirkan dan “mematangkan” frustrasi sosial di kalangan masyarakat bawah (hlm. 4).

Beberapa lembaga pemeringkat dunia memberikan nilai positif terhadap iklim investasi di Indonesia. Pada bulan Juli 2010, misalnya, Japan Credit Rating Agency Ltd (JCR) memperbaiki peringkat Indonesia hingga mencapai investment grade (level investasi).

Moody's sejak Juni 2012 hingga sekarang masih mempertahankan Ba2 untuk long-term local currency atau dua tingkat sebelum investment grade. Sementara S&P sejak Maret 2010 menempatkan long-term currency pada peringkat BB+/stable, dan Fitch menempatkan peringkat Indonesia dalam BB+/stable atau peringkat sebelum investment grade.

Peringkat-peringkat itu tentu saja menggembirakan bagi Indonesia, karena dapat menarik minat investor mancanegara menanamkan modalnya di sini. Diharapkan tentu saja mereka melakukan investasi jangka panjang di sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga akan semakin banyak orang yang dapat mengakses sektor-sektor ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Tinggal masalahnya adalah apakah birokrasi kita masih menggunakan model lama yang lambat dan korup, atau tidak. Jika birokrasi belum berubah, pembangunan untuk semua tampaknya hanya mimpi, atau sebatas teori di atas kertas.

*Artikel ini dimuat di koran *Kontan*, Sabtu 13 Oktober 2012